

TI Penting Bagi Lulusan Fakultas Hukum

YOGYAKARTA – Lulusan Fakultas Hukum menjadi salah satu sumber tenaga kerja yang selalu memiliki banyak permintaan dari dunia kerja. Karenanya, kualitas dari para sarjana hukum tersebut harus dipastikan. Bahkan ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat.

“Banyaknya sarjana hukum tiap tahunnya menjadi persoalan tersendiri terkait bagaimana menjamin kualitas mereka. Di sisi lain, perkembangan dunia, salah satunya teknologi informasi (TI) semakin pesat dan merambah ke segala sendi kehidupan masyarakat, termasuk hukum. Karenanya, lulusan Fakultas Hukum juga harusnya mampu menguasai TI,” kata Koordinator Kopertis Wilayah VDIY, Dr Ir Bambang Supriyadi CES DEA, dalam Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Hukum Melalui Kerjasama dalam Pengembangan Sistem Informasi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di UMY, Yogya, kemarin.

Bambang mengungkapkan, dari data tahun 2003, setidaknya terdapat 200 Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi

Negeri dan Swasta di Indonesia. Bila setiap tahunnya masing-masing Fakultas Hukum tersebut meluluskan 100 mahasiswanya, maka dalam satu tahun ada sekitar 20.000 sarjana hukum baru di Indonesia.

“Ini harusnya menjadi peluang bagi PT yang meluluskan mereka untuk berupaya memenuhi kebutuhan dunia kerja dengan cara meningkatkan kemampuan dan daya saing mahasiswa di bidang TI. Apalagi TI sekarang ini sudah menjadi salah satu instrumen efektif dalam perdagangan global,” kata Bambang.

Menurut Bambang, perkembangan TI kini bahkan menjadi viral di kalangan masyarakat dalam menghadapi daya saing MEA. Contoh yang telah terjadi ialah munculnya aplikasi *online* seperti taksi *online* maupun gojek. Hal tersebut juga membuktikan per-

kembangan TI menjadi berkah tersendiri untuk ekonomi baru yang lebih efisien, inovatif dan bisa dijangkau untuk semua lapisan masyarakat.

“Kaitannya dengan dunia hukum, perkembangan TI juga sudah lama memunculkan kegiatan *cyber crime*. Katenanya, lulusan hukum juga wajib menguasai TI agar pelaku *cyber crime* tidak lagi lolos dari jerat hukum. Karena subjek pelakunya dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata,” kata Bambang.

Bambang berharap dalam menghadapi era digital dan MEA ini, Perguruan Tinggi bidang Hukum dapat berperan aktif dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia di bidang hukum.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UMY Dr Trisno Raharjo SH MHum mengatakan, poin penting dalam menghadapi MEA ialah terkait dengan dorongan dalam memajukan bidang jasa. Dari kegiatan jasa tersebut akan memunculkan usaha dalam bentuk produk, di mana produk-produk itulah yang akan menimbulkan persaingan dunia bisnis.